

KEUANGAN INKLUSIF DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SUMUT

Oleh :

Lia Nazliana Nasution, SE, M.Si

Handriyani Dwilita, SE, M.Si

Dosen FEB- UNPAB Medan

ABSTRAK

Penerapan kebijakan inklusif khusus untuk Indonesia disebabkan karena masih banyaknya status *unbankable* hampir merata di semua daerah di Indonesia. Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Keuangan bekerjasama menerapkan enam pilar yang menjadi dasar penerapan kebijakan inklusif di Indonesia. Namun kebijakan yang baru digagas tahun 2012 di bulan Juni ini masih terus mengalami perkembangan pada penerapannya di lapangan. Dan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan penerapan kebijakan inklusif ini masih dilakukan oleh para peneliti yang berasal dari pulau Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat korelasi diantara faktor-faktor terkait inklusif keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara periode 2008 sampai dengan 2015. Metode pengolahan dan analisis data yaitu Analisis korelasi sederhana (*bivariate correlation*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya jumlah tabungan dengan jumlah kantor cabang bank, jumlah pinjaman (investasi, konsumsi, dan modal kerja), dan PDRB yang memiliki hubungan korelasi sangat kuat dan signifikan. Sedangkan jumlah tabungan dengan jumlah penyaluran kredit UMKM dan jumlah angkatan kerja memiliki hubungan korelasi yang rendah dan tidak signifikan.

Kata Kunci : Jumlah tabungan, jumlah kredit UMKM, jumlah angkatan kerja, jumlah pinjaman (investasi, konsumsi, dan modal kerja), PDRB

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian suatu negara akan dipengaruhi beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam negeri maupun faktor yang berasal dari luar negeri. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perekonomian tersebut adalah perkembangan keuangan. Ketika keuangan suatu negara berkembang maka akan berdampak positif terhadap

peningkatan perekonomian. Dalam hal pengembangan jasa keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan OJK mempunyai peran penting terhadap pelaksanaan dan pengawasan regulasi sektor keuangan di Indonesia. Bahkan ketiga institusi tersebut telah memiliki suatu suara terkait dengan sinergi peran jasa keuangan dan pengentasan kemiskinan. Perluasan penggunaan jasa keuangan diyakini berpengaruh terhadap penurunan

tingkat kemiskinan di suatu daerah. Dengan meningkatnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat terhadap jasa keuangan maka tingkat kemiskinan akan menurun dan peningkatan keuangan akan terjadi, pada akhirnya akan bermuara pada perkembangan perekonomian suatu daerah/negara.

Kemiskinan salah satunya disebabkan oleh terjadinya kesenjangan pendapatan di masyarakat. Negara anggota G20, OECD, the World Bank, IMF, ADB, dan Asean telah sepakat bahwa perlu diberi perhatian penuh terhadap kesejangan pendapatan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan. Maka pada tahun 2012, Indonesia telah sepakat bersama institusi tersebut untuk meluncurkan strategi nasional keuangan inklusif yang akan menjadi acuan dalam strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Keuangan inklusif pada dasarnya merupakan upaya yang disusun secara bersama yang bertujuan meniadakan bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan biaya terjangkau. Bank Indonesia telah menyampaikan enam pilar yang menjadi dasar pelaksanaan keuangan inklusif di Indonesia. Ke enam pilar tersebut meliputi: Edukasi Keuangan, Fasilitas Keuangan Publik, Pemetaan informasi keuangan, kebijakan/peraturan pendukung,

fasilitas intermediasi & distribusi, dan perlindungan konsumen.

Provinsi Sumatera Utara termasuk pada provinsi yang mengalami tingkat perkembangan perekonomian yang cukup baik jika dibandingkan dengan beberapa provinsi di Indonesia. Tercatat bahwa ibukota provinsi Sumatera Utara merupakan termasuk kota besar yang berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Namun berdasarkan data yang disampaikan oleh Bank Indonesia, Sumatera Utara masih dalam kategori unbankable. Sumatera Utara walaupun termasuk provinsi yang memiliki potensi sumber daya ekonomi yang cukup baik namun dalam hal penggunaan jasa keuangan perbankan masih dalam kategori rendah. Ini dapat menjadi indikasi bahwa pemerataan perekonomian di provinsi Sumatera Utara belum merata, dan pengetahuan mengenai jasa perbankan juga belum terserap di seluruh pelosok negeri.

Penelitian ini menggambarkan beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan dalam penerapan kebijakan keuangan inklusif di Sumatera Utara. Faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah : Jumlah simpanan / tabungan, jumlah penyaluran kredit UMKM, Jumlah Angkatan kerja, jumlah kantor cabang bank, jumlah pinjaman (modal kerja, konsumsi, dan investasi) dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga

Konstan (PDRB DAHK) selama kurun waktu 2008 hingga 2015.

METODE PENELITIAN

Peubah yang diamati atau diukur: Jumlah simpanan / tabungan, Jumlah penyaluran kredit UMKM, Jumlah angkatan kerja, jumlah kantor cabang bank, jumlah pinjaman (modal kerja, konsumsi, dan investasi) dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB DAHK). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi sederhana (*bivariate correlation*), untuk melihat korelasi diantara faktor-faktor terkait inklusif keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara periode 2008 sampai dengan 2015.

Penelitian ini dilakukan di Sumatera Utara mulai dari tahun 2008 sampai dengan 2015. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Di samping itu untuk data pendukung lainnya diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, makalah, dan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengolahan data analisis bivariate correlation dengan menggunakan program SPSS tersaji pada tabel di bawah ini :

Correlations

		tabungan	kredit	cabang	angkatan_kerja	pinjaman	pdrb
tabungan	Pearson Correlation	1	.339	.973**	.115	.987**	.899**
	Sig. (2-tailed)		.411	.000	.786	.000	.002
	N	8	8	8	8	8	8
kredit	Pearson Correlation	.339	1	.236	.585	.272	.511
	Sig. (2-tailed)	.411		.574	.128	.514	.196
	N	8	8	8	8	8	8
cabang	Pearson Correlation	.973**	.236	1	.081	.973**	.835**
	Sig. (2-tailed)	.000	.574		.848	.000	.010
	N	8	8	8	8	8	8
angkatan_kerja	Pearson Correlation	.115	.585	.081	1	-.011	.118
	Sig. (2-tailed)	.786	.128	.848		.979	.780
	N	8	8	8	8	8	8
pinjaman	Pearson Correlation	.987**	.272	.973**	-.011	1	.906**
	Sig. (2-tailed)	.000	.514	.000	.979		.002
	N	8	8	8	8	8	8
pdrb	Pearson Correlation	.899**	.511	.835**	.118	.906**	1
	Sig. (2-tailed)	.002	.196	.010	.780	.002	
	N	8	8	8	8	8	8

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari hasil analisis korelasi sederhana (r) didapat bahwa :

a. Korelasi jumlah tabungan dan jumlah penyaluran kredit UMKM adalah 0,339. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang rendah antara jumlah tabungan dengan jumlah penyaluran kredit UMKM. Sedangkan arah hubungannya adalah positif karena nilai r positif. Ini berarti semakin tinggi jumlah tabungan maka semakin

banyak kredit yang disalurkan khususnya ke UMKM.

b. Korelasi jumlah tabungan dan jumlah kantor cabang bank adalah 0,973. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara jumlah tabungan dan jumlah kantor cabang bank. Arah hubungan yang positif berarti bahwa semakin tinggi jumlah tabungan maka semakin banyak jumlah kantor cabang bank.

- c. Korelasi jumlah tabungan dan jumlah angkatan kerja adalah 0,115. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan korelasi yang sangat rendah antara jumlah tabungan dengan jumlah angkatan kerja. Sedangkan arah hubungan adalah positif yang berarti semakin tinggi jumlah tabungan maka jumlah angkatan kerja juga semakin tinggi.
 - d. Korelasi jumlah tabungan dan jumlah pinjaman (Investasi, konsumsi dan modal kerja) adalah 0,987. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara jumlah tabungan dengan jumlah pinjaman (Investasi, konsumsi dan modal kerja). Arah hubungan yang positif berarti semakin tinggi jumlah tabungan maka semakin banyak jumlah pinjaman yang diberikan.
 - e. Korelasi jumlah tabungan dan PDRB adalah 0,899. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara jumlah tabungan dengan PDRB. Arah hubungan yang positif berarti semakin tinggi jumlah tabungan maka semakin tinggi PDRB.
- Secara garis besar dapat diketahui bahwa keseluruhan proksi penelitian memiliki hubungan yang positif, baik kuat maupun lemah.
- Dari hasil uji signifikansi koefisien korelasi sederhana (Uji t) didapat bahwa :
- a. Nilai signifikansi pada korelasi jumlah tabungan dan penyaluran kredit UMKM adalah $0,411 > 0,05$ maka H_0 diterima. Artinya bahwa tidak ada hubungan signifikan antara jumlah tabungan dengan jumlah penyaluran kredit UMKM. Artinya jika semakin tinggi jumlah tabungan maka tidak akan berhubungan terhadap tinggi rendahnya jumlah penyaluran kredit ke UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan pihak UMKM terkait dengan penyaluran kredit dari pihak bank masih minim, salah satunya terkendala birokrasi atau persyaratan kredit yang belum dapat dipenuhi oleh pihak UMKM.
 - b. Nilai signifikansi pada korelasi jumlah tabungan dan jumlah kantor cabang bank adalah $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Artinya bahwa ada hubungan yang signifikan antara jumlah tabungan dengan jumlah kantor cabang bank. Semakin banyak jumlah kantor cabang yang secara merata tersebar ke pelosok nusantara maka akan mendorong peningkatan jumlah tabungan yang dihimpun bank.
 - c. Nilai signifikansi pada korelasi jumlah tabungan dan jumlah angkatan kerja adalah $0,786 > 0,05$ maka H_0 diterima. Artinya bahwa tidak ada hubungan signifikan antara jumlah tabungan dengan jumlah angkatan kerja. Ketika jumlah

tabungan semakin tinggi tidak akan berhubungan dengan peningkatan atau penurunan jumlah angkatan kerja. Secara konsep, jumlah angkatan kerja dapat meningkatkan kecenderungan jumlah tabungan, namun jumlah tabungan belum tentu dapat berhubungan dengan jumlah angkatan kerja. Mengacu pada hasil penelitian diatas dapat dikatakan bahwa kecenderungan masyarakat Indonesia yang termasuk dalam kategori angkatan kerja belum secara maksimal memanfaatkan produk tabungan sebagai pilihan solusi *idlecash*. Bisa jadi masyarakat lebih cenderung memanfaatkan produk deposito atau investasi riil seperti investasi properti untuk solusi *idlecash*.

- d. Nilai signifikansi pada korelasi jumlah tabungan dan jumlah pinjaman adalah $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Artinya bahwa ada hubungan yang signifikan antara jumlah tabungan dengan jumlah pinjaman. Ketika jumlah tabungan mengalami peningkatan maupun penurunan maka akan berhubungan dengan jumlah pinjaman yang disalurkan ke konsumsi, Investasi maupun modal kerja.
- e. Nilai signifikansi pada korelasi jumlah tabungan dan PDRB adalah $0,002 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Artinya bahwa ada hubungan yang signifikan antara jumlah tabungan dengan PDRB.

Artinya jumlah tabungan yang meningkat atau menurun akan berhubungan dengan peningkatan maupun penurunan PDRB, dengan kata lain ketika jumlah tabungan meningkat maka akan berkaitan dengan penurunan atau peningkatan jumlah konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah provinsi, nilai ekspor dan impor SUMUT.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Terdapat hubungan korelasi yang rendah dan tidak signifikan antara jumlah tabungan dengan jumlah penyaluran kredit UMKM.
2. Terdapat hubungan korelasi yang sangat kuat dan signifikan antara jumlah tabungan dengan jumlah kantor cabang bank yang ada di Sumatera Utara.
3. Terdapat hubungan korelasi yang sangat rendah dan tidak signifikan antara jumlah tabungan dengan jumlah angkatan kerja.
4. Terdapat hubungan korelasi yang sangat kuat dan signifikan antara jumlah tabungan dan jumlah

pinjaman (Investasi, konsumsi dan modal kerja).

5. Terdapat hubungan korelasi yang sangat kuat dan signifikan antara jumlah tabungan dengan PDRB.

SARAN

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan untuk wilayah atau provinsi yang berbeda sehingga penerapan keuangan inklusif secara nasional dapat terpeta dengan baik. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan variabel penelitian yang lain. Pengembangan juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianaivo M, Kpodar K. (2012). Mobile Phones, Financial Inclusion, and Growth. Review of Economics and Institution. Vol.3 No.2 Ang JB. 2010. Finance and Inequality: The Case of India. Shouthern Economic Journal. 76(3):738-761
- Anggraeni L. 2009. Factor Influencing and Credit Constraints of a Financial Self-Help Group in a Remote Rural Area: The Case of ROSCA and ASCRA in Kemang Village West Java. Journal of Applied Sciences. 9(11):20672077.
- Anwar, Arsyd M, dkk, 1992, Ekonomi Indonesia Prospek Jangka Pendek dan Sumber Pembiayaan Pembangunan, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Beck T, Demirguc-Kunt A, Levine R. 2007. Finance, Inequality and the Poor. J Econ Growth. 12:27-49. Beck T, Demirguc-Kunt A, Peria MSM. 2006. Reaching Out: Access to and Use of Banking Services Across Country. Journal of Financial Economics. 85:234-266.
- [BPS] Badan Pusat Statistik 2015. Tersedia pada <http://www.bps.go.id> [05 Oktober 2015].
- [BI] Bank Indonesia. Statistik Perbankan Indonesia 2015. Tersedia pada <http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/indonesia/Default.aspx> [02 Oktober 2015].
- ____ Bank Indonesia. Statistik Perbankan Indonesia 2015. Tersedia pada [Tersedia pada <http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/indonesia/Default.aspx>](http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/indonesia/Default.aspx) [5 Oktober 2015].
- ____ Bank Indonesia. 2015. Booklet Keuangan Inklusif Bank Indonesia. Tersedia pada <http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/edukasi/Contents/Buku%20Saku%20Keuangan%20Inklusif.pdf> [25 September 2015].
- Demirguc-Kunt A, Beck T, Honohan P. 2008. Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access.

- Washington, DC (US): World Bank.
- Demirguc-Kunt A, Klapper L. 2012. Measuring Financial Inclusion The Global Financial Index.
- Kasmir, 2003, Dasar-Dasar Perbankan, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mankiw, N. Gregory, 2003, Pengantar Ekonomi, Edisi Kedua, Jilid 2, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Muchtolifah, 2007. Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Tabungan Masyarakat pada Bank Umum dikota Surabaya. Jurnal Ilmu-ilmu Ekonomi Vol 7 No. 2:20-29
- [OJK] Ototritas Jasa Keuangan. Laporan Triwulanan OJK Tahun 2014. Tersedia pada <http://www.ojk.go.id/ojk-terbitkan-laporan-triwulan-i-tahun-2014> [12 September 2014]
- Sarma Mandira, Jesim Pais. 2011. Financial Inclusion and Development. J Int Dev. 23:613-628. Shahbaz M, Islam F. 2011. Financial Development and Income Inequality in Pakistan: An Application of ARDL Approach. Munich Personal RePEc Archive (MPRA). 17:13.
- Sarma Mandira. 2012. Index of Financial Inclusion – A measure of financial sector inclusiveness. Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and development. Working Paper No.07/2012.
- Suparmoko, 1997, Ekonomi Pembangunan, Edisi Ketiga, Penerbit UGM, Yogyakarta.
- Susilo, Sri Y, dkk, 2000, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Ummah, Bintan Badriatul, 2015, Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia. Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- _____, 2013, Analisis Keterkaitan Inklusi Keuangan dengan Pembangunan di Asia. Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB. Bogor
- Van der Werff AD, Hogarth JM, Peach ND. 2013. A Cross-Country Analysis of Financial Inclusion within the OECD. Consumer Interest Annual. Volume 59.
- Wachira MI, Kihui EN. 2012. Impact of Financial Literacy on Access to Financial Services in Kenya. International Journal of Business an Social Science. Vol 3 No.19.
- World Bank: Working Paper No 6025. European Commission Report. 2008. Financial Services Provision And Prevention of Financial Exclusion.